HARIAN analisa

Penerbit : PT. Media Warta Kencana
Pemimpin Umum : Supandi Kusuma
Pemimpin Perusahaan : Sujito Sukiman
Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Ir. Soffyan
Wakil Pemimpin Redaksi : War Djamil
Managing Editor : Paulus M. Tjukroo
Redaktur : H. Agus Salim, Anthony Lintan, H. Hermansyah, SR. Hamonangan Pangabean, Idris Pasaribu, Hendar Tasmin, Kwa Tjen Siang, Saurma, H. Ali Marthado, Sugiatmo, Gunturadi Sukma, Tengku Kamaruzaman, Rizal Rudi Surya, Taufik Wel Hidayat, Zulmiadi, Muhammad Arifin, Zulmiadi, I Junto.
Anggota Redaksi : Faisal Pardede, T. Deddy Bustamam, Irham Nasution, Ridwan, Bachtiar Adamy, Fahrin Maku, M. Abduh, Ramadan Zoko Sagala, Rhinto Suroso, Amru Lubis, M. Ali Akbar, M. Iqbal Nasution, Hendra Irawan, Mahjijah Chair, Suhayri Ramadan, M. Syahrial Muksin, Dina Nurbetty, Ilham Ridwan, Jaholong Situanggang, Bardansyah, Bambang Riyanto, Dedy Gunawan Hutajulu, Ismaini Kharisma, Nirwansyah Sukartara, Syafirin Tambunan, Yogi Yuwasta, Adelina Savitri Lubis, Eko Satria Handoko, Indah Pratiwi, Sari Ramadani, Irin Juwita, Nur Aksmal, Ahmad Nugraha Putra.
Fotografer : Teddy Siregar, M. Said Harahap, Junaidi Gandy, Khairil Umri Batubara, Qodrat Al-Qadri.
Terbit : Seminggu 7 kali
Harga Iklan : Rp. 15.000,- per mm/kolom (umum)
Rp. 10.000,- per mm/kolom (kabar dukacita)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 35-49 Medan 20111
Kotak Pos : 1481, Telex No. 51326
Telepon : Redaksi : (061) 4150655 (5 saluran)
Fax. (061) 4534116.
Tata Usaha : (061) 4154711 (5 saluran), 4513554, 4524136, 4534279. Fax. (061) 4151436.
Perwakilan Jakarta : Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 43-A
Jakarta Pusat, Tlp. (021) 6322440, 6322271, 6322289
Fax. : (021) 6322315
SIUPP : SK. Menpen No. 02/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Desember 1985
Dicetak Oleh : PT. SURYA MAS ABADI MAKMUR
Jl. Pulau Solor KIM II Mabar - Deliserdang

Tajuk Rencana

Netralitas

EMPAT hari menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau pada Sabtu (23/6), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup membuat heboh. SBY mengungkap ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam kontestasi pilkada di Indonesia.

Pernyataan tersebut cukup membuat heboh karena disampaikan seseorang yang pernah memimpin negara ini. Sebagai seorang yang pernah memimpin negara ini, tentu ia sangat tahu bagaimana "sepak terjang" lembaga-lembaga tersebut. Bahkan dengan tegas Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) mengatakan, apa yang disampaikannya tersebut bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Hal tersebut katanya nyata kejadiannya, bukan hoaks.

Tentu saja tudingan ini mendapat mendapat reaksi keras dari pihak-pihak terkait. Pemerintah melalui Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyampaikan bantahannya. Ia meminta agar tokoh bangsa bersabar dan menjaga suasana jelang Pilkada 2018 tetap teduh. Kepada pihak-pihak yang menyampaikan informasi tersebut kepada SBY, Ngabalin mintaagar memberikan informasi yang benar dan validitasnya tidak diragukan.

Bantahan juga disampaikan BIN. Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Purwanto mengatakan, tidak ada satu pun perintah yang dilalamatkan kepada anggota BIN di mana pun untuk berpihak pada calon tertentu pada pilkada. Dikatakan, saat ini adalah era yang penuh keterbukaan. Bila ada kejanggalan dan bukti tentang anggotanya yang berpihak pada salah satu pasangan tertentu pada Pilkada 2018, maka dengan terbuka BIN akan menerima pelaporan itu, dan segera memproses sanksi serta hukum bagi anggotanya.

Masalah keberpihakan atau netralitas merupakan hal yang selalu muncul dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) apakah itu pilkada, pemilihan legislatif (pileg) maupun pemiliha presiden (pilpres). Namun selama ini persoalan tidak netral selalu dialamatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pemilu yaitu komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (bawaslu).

Sementara tudingan yang disampaikan SBY 'menohok' institusi yang sebenarnya berperan sebagai penjaga keamanan dalam kontestasi pemilu. Kalau pihak yang selama ini diberi tanggung jawab untuk mengamankan dan menjaga pemilu tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar ternyata "ikut bermain", bagaimana hasil dari kontestasi tersebut? Sudah pasti hasilnya tidak sesuai dengan harapan rakyat banyak. Karena bagaimanapun dalam demokrasi, kehendak rakyat banyak itu yang menjadi pemenang.

Tapi tudingan tersebut tidak dengan serta merta bisa menjadi pembenaran tanpa data yang benar dan valid. SBY boleh saja memiliki keyakinan bahwa yang disampaikan tersebut nyata dan bukan hoaks. Tapi keyakinan tanpa disertai data yang valid dan akurat, belum bisa dijadikan pegangan.

Yang pasti, terlepas dari benar atau tidaknya tudingan tersebut, penyelenggara pemilu (KPU dan bawaslu), ASN, TNI, Polri maupun BIN harus netral dalam pelaksanaan pemilu umumnya dan pilkada khususnya. Tanpa netralitas, hasil dari pilkada tidak akan sesuai dengan harapan kita semua. Sebab bagaimanapun kita semua pasti menginginkan sebuah pilkada yang berlangsung tidak hanya aman dan lancar saja tapi juga harus berkualitas. Berkualitas di sini maksudnya berlangsung secara fair tanpa ada intimidasi, tekanan, paksaan dan sebagainya terhadap pemilih. Di samping itu, pilkada berkualitas harus lepas dari intrik-intrik kotor dan sebagainya.

Sebab hanya melalui pilkada yang berkualitaslah, kita bisa memilih pemimpin-pemimpin di daerah yang berkualitas pula. Bukankah kemampuan seorang kepala daerah sangat menentukan kemajuan suatu daerah? Sebab itu sangat penting bagi pemilih untuk memilih kepala daerah yang berkualitas. Pilkada berkualitas salah satunya bisa berlangsung apabila pihak-pihak terkait menjaga netralitas!

Guit seli

MASYARAKAT diminta jangan Golput.

- Satu suara sangat berharga.

ooOoo

WAPRES: Pemilu 2019 terunuit di dunia.

- Inilah Indonesia.

ooOoo

KPK harus tetap jadi lembaga khusus.

- Khusus menangani korupsi.

ooOoo

BungGuit

Mencari Pemimpin yang Melayani

Oleh: Risya Pramana Situmorang

Pesta demokrasi dalam ajang Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara serentak akan diselenggarakan pada hari ini, 27 Juni 2018. Proses Pilkada akan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara langsung untuk memilih kepala daerah masing-masing.

Pilkada tahun ini akan memilih sejumlah kepala daerah yaitu 7 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Persaingan antar kandidat meang-masing daerah senaikin terasa dan menunjukkan rasa percaya diri untuk ingin menang. Tentu kemenangan yang diincar dalam hajatan lima tahun sekali ini agar bisa jadi peminpin daerah untuk periode lima tahun mendatang.

Khususnya Provinsi Sumatera Utara akan memilih 7 pasang bupati dan wakil bupati di tujuh kabupaten yaitu Langkat, Deliserdang, Dairi, Batubara, Tapanuli Utara, Padanglawas dan Padanglawas Utara. Tak kalah semarakanya, masyarakat Sumut pun akan memilih satu pasang Gubernur dan wakil gubernur, serta satu pasang Walikota dan wakil walikota di kota Padang Sidempuan.

Meski masing-masing calon peminpin daerah belum terpilih, mereka sudah banyak mengumbar janji di hari-hari kampanye mereka. Tak sedikit dari mereka yang mengklaim adalah peminpin yang terbaik dan layak pilih. Bahkan dengan menawarkan visi-misi yang "bombastis" agar manipu menarik simpati rakyat. Tentu itulah berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menuju singgasana negeri inipian yang rakyatnya hidup berkeadilan dan sejahtera.

Tapi apapun ceritanya, jika terpilih pada momen Pilkada nanti, mereka jugalah yang nanti akan menjadi peminpin. Terlepas dari suka atau tidak suka dengan peminpin yang terpilih nantinya. Namun itulah esensi dari demokrasi. Masa depan daerah dipertaruhkan di tangan peminpin yang terpilih. Meski kita juga bisa menganalisis apakah mereka benar-benar punya jiwa peminpin atau sekedar "bermimpi" jadi peminpin.

Oleh karena itu, berbagai kondisi di daerah menjadi tanggung jawab peminpin yang benar-benar punya jiwa kepeminpinan. Daerah mau maju tentu bergantung pada gaya kepeminpinan yang dipakai.

Salah satu tolak ukur pencapaian suatu daerah dapat dilihat dari gaya kepeminpinan kepala daerahnya. Cara berpikir inovatif dan kreatif peminpin akan menentukan pencapaian suatu organisasi yang dikelolanya.

Meski meminpin daerah atau provinsi pasti melebihi cara meminpin level organisasi. Jika seorang peminpin tidak punya gaya kepeminpinan (leader style), maka peminpin tersebut hanya akan lalah kebijakan. Tidak punya ide orisinil dan brilian untuk mendobrak permasalahan daerah. Akibatnya, sistem organisasi daerah hanya jadi kuburan yang tak bernyawa. Maksudnya, hasil kinerja yang terjadi hanya sampai fase stasioner (datar), atau balikan bisa menurun.

Harapan masyarakat akan kepeminpinan yang memiliki hasrat *(passion)* adalah sebagai bentuk dorongan mencapai tujuan bersama. Geliat masyarakat di masing-masing daerah tentu akan ditentukan dari konsep gaya kepeminpinan. Akhir-akhir ini kita sering diperhadapkan dengan suatu pandangan baru tentang konsep kepeminpinan. Peminpin yang selalu diterima rakyat adalah peminpin yang berhati tulus dan mau melayani. Melayani maksudnya adalah mau menempatkan diri secara total terhadap kebutuhan rakyat yang dipinpinnya.

Peminpin yang melayani

Konsep tentang peminpin yang melayani diluncurkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970. Greenleaf menjelaskan bahwa peminpin yang melayani adalah peminpin yang tak lekang oleh waktu. Seorang peminpin harus menjadi pelayan yang harus terlebih dahulu melayani.

Kepekaan akan kebutuhan orang lain tentu menjadi modal utama seorang peminpin. Bukan menganbil untung sendiri bahkan merampas "harta benda" dari orang yang dilayani. Tapi seyoganya bersama-sama bertumbuh dalam pelayanannya. Gagasan ini merupakan konsep yang melibatkan perasaan secara natural melalui proses terjadinya. Perasaan alami inilah yang nantinya menibawa seseorang untuk terbeban menjadi peminpin.

Peminpin yang melayani memberi suatu pandangan bahwa seorang peminpin adalah orang yang meminpin sekaligus sebagai pelayan. Artinya, tugas seorang peminpin sejatinya adalah meminpin kemudian mengutamakan pelayanan sebagai ujung tombak. Disisi yang lain sering kita temukan banyak peminpin yang menempatkan dirinya adalah sebagai orang yang dilayani. Mengutamakan posisinya sebagai peminpin *(leader first)*. Kedua fenomena itu cukup kontras perbedaannya jika kita bandingkan.

Peminpin yang menempatkan kekuasaan sebagai yang utama adalah peminpin yang hanya berorientasi pada diri sendiri atau kepentingan kelompoknya. Sikap seperti ini cenderung punya hasrat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun peminpin yang melayani adalah seseorang yang memberi dirinya sebagai wujud pelayanan dan totalitas pengabdian.

Tentu perbedaan tipe kepeminpinan ini dapat terlihat dari segala tindakan dan rekam jejak *(track record)* seseorang. Wujud berbela rasa secara tulus akan terlihat melalui tindakan dan kepedulian. Selanjutnya bagaimana seorang peminpin juga terlihat dari prioritas tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat yang dilayani.

Peminpin yang melayani adalah peminpin yang menempatkan kepentingan dan kebutuhan orang lain terlebih dahulu. Secara luas, seorang peminpin akan memberi kesejahteraan terhadap semua orang-orang yang dipinpin. Berbeda dengan peminpin yang egosentris yaitu hanya menerapkan kekuasaan sebagai kesempatan untuk menumpuk keuntungan. Namun, peminpin yang melayani akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui fokus yang tepat.

(Bersambung ke hal. 20)

Pesta Demokrasi dan Tata Kelola Kawasan Urban

Oleh: Djoko Subinarto

Pilkada serentak yang berlangsung di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, hari ini 27 Juni 2018, diharapkan menghasilkan para kepala daerah yang antara lain manipu mengkreasi pelbagai kebijakan terkait tata kelola kawasan urban demi menjadikan kota-kota kita semakin sehat, senaikin layak huni dan juga berkelanjutan.

Seperti kita maklumi, dewasa ini kawasan perkotaan kita cenderung senaikin padat. Akibatnya, kota-kota kita menanggung beban yang kian berat. Menurut taksiran, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan saat ini telah mencapai 45 persen dari total penduduk keseluruhan dan diperkirakan bakal meningkat hingga mendekati 70 persen di tahun 2025 mendatang. Tentu saja, hal ini bakal menibawa konsekwensi dalam banyak dimensi dan sekaligus menjadi tantangan besar bagi para kepala daerah kita dalam soal bagaimana kota-kota yang mereka kelola bisa tetap layak huni dan menjadi kota yang sehat dan berkelanjutan.

Roderick Lawrence (2008) memaparkan setidaknya ada empat jenis risiko yang umumnya bakal dihadapi kawasan-kawasan perkotaan di masa datang. Yang pertama adalah risiko lingkungan. Sejumlah masalah yang dihadapi kawasan perkotaan yang terkait dengan risiko lingkungan antara lain adalah masalah melonjaknya tingkat kebisingan, meningkatnya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara serta persoalan pembuangan sampah.

Selanjutnya adalah risiko ekonomi berupa persoalan penyediaan rumah layak huni, ketersediaan pangan, ketersediaan air bersih dan juga ketersediaan lapangan kerja maupun ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang adil dan terjangkau bagi semua warga.

Yang berikutnya adalah risiko teknologi berupa kemacetan, kecelakaan lalulintas dan kecelakaan industri. Dan yang teraktir adalah risiko sosial berupa meningkatnya kriminalitas, tindak kekerasan, putus sekolah dan pengangguran.

Nyaman dan Aman

Sama halnya seperti manusia, kota perlu diupayakan untuk tetap sehat. Kota yang sehat akan menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi warganya untuk tinggal, bekerja sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Kota yang sehat adalah kota yang senantiasa terus menerus menciptakan dan meningkatkan kondisi lingkungan sosial dan kondisi lingkungan fisiknya ke arah yang semakin baik. Selain itu, kota tersebut juga terus mengupayakan perluasan dan pemanfaatan sumber dayanya sehingga memungkinkan segenap warga manipu saling mendukung dalam melaksanakan semua fungsi kehidupan dan dalam mengembangkan segenap potensi warga kota secara maksimal.

Merujuk pada hasil kajian yang dilakukan oleh Prenilia Webster dan Mark McCartiy dari WHO Healthy Cities Technical Working Group On Health And Indicators, secara garis besar ada tiga indikator yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kota sehat dan sekaligus dijadikan pijakan bagi pengelola kota untuk menetapkan langkah atau kebijakan yang hendak dianbil.

Yang pertama adalah indikator kesehatan dan layanan kesehatan. Ini meliputi tingkat kematian dan penyebabnya serta tingkat kelahiran bayi yang lahir dengan berat badan kurang. Adapun indikator layanan kesehatan meliputi antara lain keberadaan program pendidikan kesehatan bagi warga kota, persentase bayi yang diimunisasi, rasio jumlah warga dengan dokter/petugas medis, rasio jumlah warga dengan perawat, persentase warga yang tercangkup oleh layanan asuransi kesehatan, jumlah masalah kesehatan yang diberi perhatian oleh pengelola kota per tahun.

Berikutnya yaitu indikator lingkungan. Ini meliputi tingkat polusi lingkungan, kualitas air, persentase air pencemar yang berhasil dikeluarkan dari seluruh limbah air yang dihasilkan, tingkat penibuangan limbah rumah tangga, tingkat pengelolaan limbah rumah tangga, persentase luas lahan hijau terbuka dengan luas lahan kota secara keseluruhan, akses warga terhadap lahan hijau terbuka, tingkat aktivitas olahraga dan rekreasi warga, fasilitas bagi pejalan kaki, fasilitas bagi pengguna sepeda dan jumlah warga yang menggunakan sepeda, fasilitas dan jaringan transportasi umum serta kualitas penukinan warga.

Teraktir adalah indikator sosial-ekonomi, yang mencangkup persentase penduduk yang hidup dengan fasilitas yang buruk, taksiran jumlah warga yang tuna wisma, jumlah pengangguran, persentase warga yang berpenghasilan di bawah rata-rata pendapatan per kapita, tingkat kebangkrutan industri/usaha, persentase jumlah tempat penitipan anak dengan jumlah anak pra-sekolah, persentase jumlah anak yang lahir dan hidup dengan jumlah ibu, tingkat aborsi dikaitkan dengan jumlah total kelahiran yang hidup serta persentase orang cacat yang bekerja.

Aspek Prioritas

Menurut hemat penulis, terdapat setidaknya sepuluh aspek yang perlu menjadi prioritas para pengelola kota kita agar kota-kota yang mereka kelola di negeri ini manipu mewujud sebagai kota sehat dan berkelanjutan.

Pertama, menerapkan konsep kota pejalan kaki *(walkable city)*. Pengelola kota harus manipu menyediakan pelbagai fasilitas dan layanan publik bagi seluruh warga kota yang dapat diakses secara mudah dari penukinan warga dengan cukup berjalan kaki.

Kedua, jaminan air bersih, udara bersih dan tanah yang bersih. Selain menjamin segenap warganya mendapat jatah air bersih yang adil dan merata, pengelola kota juga harus menjamin warganya mendapatkan udara dan tanah yang bersih.

Ketiga, penggunaan energi yang bersih dan terperbarui sehingga tidak terlalu mencemari dan membebani lingkungan, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

Keempat, tersedianya bahan makanan yang sehat dan terjangkau bagi seluruh warga kota dengan proses penanaman/penbuatan serta pendistribusian bahan makanan yang senantiasa memerhatikan aspek kesehatan lingkungan.

Kelima, keanekaragaman hayati. Pengelola kota manipu menyokong keanekaragaman hayati ekosistem lokal, regional maupun global termasuk keanekaragaman spesies dan keanekaragaman genetik.

Keenam, kebudayaan yang sehat. Pengelola kota harus manipu menfasilitasi pelbagai aktivitas kebudayaan masyarakat sehingga ikut memperkuat kesadaran lingkungan, meningkatkan pengetahuan dan daya kreatifitas warga serta proses pembelajaran sosial.

Ketujuh, penibentukan dan pengembangan komunitas. Pengelola kota harus mendukung terbentuknya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan menyediakan pelbagai peluang serta perangkat bagi terbentuknya pelbagai komunitas, organisasi maupun lembaga di dalam masyarakat.

Kedelapan, perekonomian yang sehat dan setara. Pengelola kota harus manipu menciptakan sistem aktivitas perekonomian yang bisa menguranggi dampak negatif lingkungan. Di sisi lain, kesehatan dan kesejahteraan warga, yang berlandaskan pada prinsip keadilan bagi semua warga dapat terus ditingkatkan.

Kesembilan, pendidikan seumur hidup. Semua warga kota meniliki akses yang sama bagi perolehan pendidikan seumur hidup, termasuk kesempatan memerolehi informasi mengenai sejarah, lingkungan dan budaya kota melalui pendidikan formal dan informal, peladiran serta institusi sosial.

Kesepuluh, kualitas kehidupan. Pengelola kota harus manipu mewujudkan kepuasan segenap warga kota dengan berpedoman pada indikator kepuasan kualitas hidup yang meliputi aspek pekerjaan dan pendapatan, perumukinan, lingkungan alam, kesehatan fisik serta kesehatan jiwa, pendidikan, keamanan, hobi dan rekreasi serta pergaulan dan ikatan kemasyarakatan.

Nah, para kepala daerah terpilih hasil dari Pilkada serentak 27 Juni nanti diharapkan manipu merealisasikan kesepuluh aspek di atas. Dengan begitu, kota-kota kita menjadi senaikin sehat, senaikin layak huni dan juga berkelanjutan, yang bakal menibuat betah dan bahagia para warganya, tanpa kecuali.***

Penulis adalah kolumnis dan esais

Politik Praktis Tanpa Iman

Oleh: Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA

CELAKALAH setiap manusia yang menggadaikan keimanannya dengan uang. Harapan besar kita gantungkan pada Demokrasi di era Reformasi ini. Dan kita akan menghadapi pemilukada serentak Juni 2018 dan Pemilu tahun 2019 nanti, semuanya harus mengedepankan asas transparansi bernegara.

Kemapanan pengetahuan masyarakat tentang situasi politik bangsa ini, menjadikan masyarakat sangat pragmatis memandang politik. Semuanya sangat fungsional, semua dikaitkan dengan uang. Praktik ini sudah berakar, atas-bawah, kiri-kanan. Seolah bangsa ini berjalan dengan pragmatisme-nya sendiri.

Apatisme masyarakat sudah menyentuh pada sisi "kebangkrutan cara pandang". Kebanyakan masyarakat tidak lagi merasa penting melihat figur siapa yang akan di gpilih pada pemilu ini, tidak lagi merasa penting melihat konitmen dan visi-misi yang dibangun, masyarakat hanya akan mengikat nalurI komersialisme. "Apa dapat berapa, siapa dapat apa". Inilah bagian dari pengalaman penulis ketika berjalan mengunjungi berbagai wilayah di Sumatera Utara ini.

Jika ditanya penyebab, jawabannya sangat Kausalitas. Semuanya punya sebab-akibat. Kinerja buruk anggota legislatif nembuat masyarakat "muak" memilih. Masyarakat hanya berafiliasi dengan kepeningannya. Masyarakat "tak sanggup" berfilosofis dengan makna keberhasilan kepeminpinan, mereka punya hitungan yang akurat, berhasil ini, tidak lapar, tidak sakit, tidak niskin dan semacannya.

Jika di tanya pula, mengapa masyarakat sangat pragmatis memandang keberhasilan kepeminpinan itu, jawabannya, karena banyak calon anggota legislatif, eksekutif baik pusat dan daerah menjanjikan hal yang pragmatis. Padahal ukuran pragmatis tidak bisa sama. Bagaimana mau mengukur tidak niskin pada sesua orang, dan sesuia orang sudah bergantung pada ukuran dirinya sendiri.

Di sisi lain, di mulainya "budaya bayar" dalam setiap kampanye, tidak sedikit akhirnya masyarakat, setiap menerima kunjungan calon legislatif, selalu yang di tanya, " di kasi apa di bayar berapa". Hal ini terasa kejam sebenarnya.

Keimanan dan Politik

Pada saat inilah kita harus disadarkan dengan nilai-nilai keimanan. Bukankah kita semua umat beragama. Semua agama kita mengajarkan kesucian, kejujuran, itikad baik, dan meninggalkan kejalatan. Seharusnya norma berpolitik di mulai dari nilai-nilai keimanan. Jangan pernah tinggalkan keimanan dalam berpolitik. Inilah yang menibuat kita mengasiniilasi kebenaran dan kemungkaran. Akhirnya kita sulit membedakan mana yang benar-salah. Ini pula yang menibuat kita mempersempit cara pandang.

Masyarakat merasa senang dan berhasil jika di beri uang para caleg, para caleg-pun merasa nyaman dan cukup hanya menibayar masyarakat untuk memilihnya. Akhirnya terjadilah komersialisasi politik. Ikatan kontrak politik hanya berhenti sebatas pilih memilih. Setelahnya, masyakat akan ditinggalkan, masyarakat hanya berharap tanpa realita.

Masyarakat harus sadar, bahwa pemilu ini bukan hanya sekedar coblos-menyoblos atau contreng-mencontreng. Lebih dari itu, "pelabuhan" bangsa ini akan ditentukan setelahnya. Kita-kita yang memandang politik sekedar uang, bersiaplah mendapatkan peminpin koruptor jilid bara, karena mereka sedang mempraktekkan teori "rentenir". Pinjaman sudah diberikan kepada kita, saanya dipulangkan melalui uang bangsa ini berlipat-lipat.

Jangan pernah menggantungkan keberhasilan hanya dengan uang. Meskipun uang bagian dari solusi kehidupan. Namun keimanan kita harus manipu menjadi benteng, agar bangsa ini dengan segala prilakunya kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai kita hanya memiliki karena uang. Jadilah nanti perwakilan kita di legislalitif para penyanun, preman jalanan yang menghampakan keimanan.

Keuangan tanpa ketuhanan akan menibuat masyarakat hidup tanpa tujuan. *Life by money not life by faith*. Teori ini harus dibalikkan. Kita nasih punya jalan untuk menperbaiki bangsa ini. Biarkan para caleg yang terpilih akan menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Merasa terhutang karena kepercayaan masyarakat, bukan di dominasi oleh uang yang telah ditaburkan.***

Resensi Buku

Menyembuhkan Luka dengan Menulis

Judul Buku	:	Luka Dalam Bara
Penulis	:	Bernard Batubara
Penerbit	:	Noura Books
Cetakan	:	I, Maret 2017
Tebal	:	108 halaman
ISBN	:	978-602-385-232-1

SETIAP penulis tentu memiliki alasan-alasan mengapa ia memutuskan untuk menapaki dunia kepenulisan. Sebagian ada yang karena ingin mengekspresikan gagasan atau idenya, sebagian lagi menjadikan menulis sebagai lahan mencari uang, dan masih ada sederetalasan lainnya. Bernard Batubara, penulis kelahiran Pontianak Kalimantan Barat, misalnya. Seiring berjalannya sang waktu, motivasi menulisnya ternyata mengalami perubahan.

Dalam buku ini Bernard menceritakan, awalnya ia menulis untuk kabur dari kenyataan. Selama ini, dunia kesehariannya nemiang terasa menyenangkan tetapi ia merasa masih ada yang kurang. Ia ingin dunia yang lebih dari apa yang dialaninya sehari-hari. Dan ia tak menemukan hal itu di mana pun kecuali menciptakannya sendiri melalui tulisan.

Seiring laju sang waktu, penulis yang bernukim di Yogyakarta ini menemukan alasan lain, mengapa ia harus menulis. Yakni sebagai sebuah saranan untuk mengeluarkan beragam perasaan dan emosinya.

"Saya menyinpan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, yang tidak bisa saya sanpaikan melalui suara. Saat saya marah, gelisah, patah hati, cemburu, cemas, takut, saya tidak selalu bisa mengungkapkannya balakan kepada orang yang sangat dekat dengan saya," paparnya (hal 2).

Masih ada satu lagi motivasi nemulis Bernard yang diungkapkannya dalam buku ini. Yakni untuk menyembuhkan dirinya dari perasaan-perasaan yang tidak ingin ia miliki, dari luka yang tidak ingin ia perani. Atau dalam kata lain, menulis bagi Bernard adalah sebuah upaya untuk menyembuhkan luka.

Dalam buku yang berisi sekumpulan fragmen ini, Bernard berupaya mengungkapkan berbagai hal yang pernah ia rasakan. Misalnya tentang pertengkaran-pertengkaran kecil atau tentang kerinduan dan rasa cinta terhadap orang yang ia sayangi, tentang kecintaannya terhadap buku, dan lain sebagainya.

Kecintaan Bernard terhadap buku dan orang yang mencintai buku, tertuang dalam goresan fragmennya yang cukup menikat berikut ini; "Aku mencintainya karena ia mencintai kata-kata. Rumah terbaik bagi kata-kata adalah buku. Aku mencintainya lebih lagi karena ia mencintai buku-buku. Aku mencintainya karena ia adalah buku bagi kata-kata yang tidak bisa aku naliskan. Aku mencintainya karena dia menjadi rumah bagi setiap kecemasan yang tidak perlu aku tunjukkan (hal 7).

Tak hanya tentang kerinduan dan cinta, Bernard juga mengurai kegelisahan hatinya tentang sebuah kota berinisial Y, yang awalnya terasa nyaman diluni, tetapi saat ini sudah tak nyaman lagi, karena begitu penuh sesak oleh bangunan mal, hotel, dan lain sebagainya. Bernard pun menulis, menyuarakan isi hatinya, "Apa artinya pembangunan jika kenyamanan penduduknya menjadi korban?" (hal 47).

Melalui buku ini, pembaca dapat menyelami perasaan-perasaan penulis nielalui kata-kata yang begitu indah dan menikat.***

**Resensi adalah penulis lepas nuiam di Kelumun.*